

ABSTRAK

Latar belakang penulisan disertasi ini yaitu dilandasi tidaknya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam tugas kewenangan Notaris, khususnya kebijakan hukum dalam penegakan hukum pada ranah kenotariatan terjadi pergeseran alat bukti dari alat bukti otentik (surat) sengaja digeser oleh penegak hukum menjadi alat bukti kesaksian. Kebijakan hukum alat bukti otentik sebagai alat bukti mutlak terhadap penegak hukum, sudah jelas diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RGB dan 1866-1875 KHUPerdata, sekaligus mengenal adanya asas *probatio plane* (herarki dalam alat bukti hukum perdata), berbeda dalam hukum pidana yang mengenal asas *vrije bewijs* (pembuktian bebas), Pasal 1870 KUH Perdata yang menetapkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya belum berbasis nilai keadilan? Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam penerapan kebijakan hukum atas tugas kewenangan pembuatan akta otentik saat ini? Bagaimana konstruksi ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya berbasis nilai keadilan?

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *socio legal* dengan tradisi penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma *constructivism*. Pembahasan dilakukan secara *komprehensif* dengan menggunakan pendekatan hukum progresif pada pencapaian keadilan sosial.

Hasil penelitian: dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Fakta dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Skema hukum pidana dengan hukum perdata dan administrasi negara tidak akan saling menyilang atau *overlap*. Terdapat penolakan oleh ahli hukum jika *un-profesional* dimasukkan dalam skema pelanggaran pidana. *Un-profesional* lebih tepat masuk dalam ranah pelanggaran kode etik profesi. Faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu faktor hukum dan penegak hukum, bias antara faktor pidana dan perdata, faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum serta faktor masyarakat dan budaya, dan hambatan lain yaitu hambatan organisatoris, personal, operasional dan managerial, rekonstruksi konstruksi ideal kebijakan hukum terhadap notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya berbasis nilai keadilan.

Rekomendasi: Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM harus berani melakukan perubahan konsep ideal Notaris dengan memberikan hak-hak Notaris selayaknya pejabat publik atau pejabat yang menjalankan tugas negara. Sehingga ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 UUJN dan peraturan lain yang terkait, perlu dilakukan peninjauan ulang dan perlu dilakukan *rule breaking*.

Kata Kunci: Notaris, Penegakan Hukum dan Alat Bukti Otentik.

ABSTRACT

The background for the writing of this dissertation is based on whether there is a balance between rights and obligations in the duties of the notary's authority, in law enforcement in the realm of notary there is a shift in evidence from authentic evidence (letters) deliberately shifted by law enforcers to become evidence of testimony. The policy of authentic evidence as absolute evidence against law enforcers is clearly regulated in Articles 164 HIR, 284 RGB and 1866-1875 Civil Society, as well as recognizing the existence of the probatio plane principle (hierarchy in civil legal evidence), which is different in criminal law which recognizes the principle of vrije bewijs (free proof), Article 1870 of the Civil Code which stipulates that an authentic deed provides between the parties and their heirs or people who get rights from them, a perfect proof of what is contained in it.

The problem in this research is why the legal policy towards notaries as witnesses and authentic deed evidence that they make is not based on the value of justice? What are the barriers to legal protection for Notaries in implementing legal policies on the current authentic deed making authority? What is the ideal construction of legal policies for notaries as witnesses and evidence of authentic deeds which they make based on the value of justice?

The approach method in this research is socio legal with the tradition of qualitative research, using the constructivism paradigm. The discussion is carried out comprehensively using a progressive legal approach to achieving social justice.

Research results: in practice it is found that a legal action or violation committed by a notary related to an authentic deed qualifies as a criminal act. In practice, it is found that a legal action or violation committed by a notary can actually be subject to administrative or civil sanctions or codes. ethics of a notary's office, but later withdrawn or qualified as a criminal act committed by a notary. Criminal law schemes with civil law and state administration will not cross or operate. There is a refusal by legal experts if un-professional is included in the criminal offense scheme. Un-professional is more appropriately included in the realm of violation of professional code of ethics. Factors that hinder law enforcement, namely legal and law enforcement factors, bias between criminal and civil factors, facilities and facilities for law enforcement as well as community and cultural factors, and other obstacles, namely organizational, personal, operational and managerial barriers, Reconstruction of Ideal Construction of Legal Policy Against Notary as a witness and authentic deed evidence that he makes based on the values of justice.

Recommendation: The state, through the Ministry of Law and Human Rights, must have the courage to change the ideal concept of a Notary by granting Notary rights as public officials or officials who carry out state duties. So that the provisions of Articles 15, 16 and 17 of UUJN and other related regulations, need to be reviewed and a rule breaking is necessary.

Keywords: Notary, Law Enforcement and Authentic Evidence.